



SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG

Yulia Ramadhani¹, Nasrah²
STMIK Lamappapoleonro Soppeng
Teknik Informatika, STMIK Lamappapoleonro Soppeng
e-mail :yulia.stmik@gmail.com¹, nasrah@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng dimana sistem monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng sudah terkomputerisasi dalam sistem pengelolaannya, tetapi belum terinput dalam satu database sehingga sistem pengelolaan membutuhkan waktu yang lama, dan datanya bisa saja hilang. Tujuan selanjutnya adalah merancang dan mengimplementasikan sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, dengan waktu sekitar dua bulan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan teknik kepustakaan dengan menggunakan pemrograman visual basic 6.0, dengan metode pengujian Blackbox. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng dapat memberikan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan dan dapat membantu Pemerintah dalam memonitoring dan mengevaluasi anggaran yang sedang berjalan maupun yang telah terealisasi.

Kata Kunci : Sistem Informasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan.

Abstract

This research aims to analyze the monitoring and evaluation system of the implementation of the Regional Budget of Revenue and Expenditure (APBD) at the Soppeng Education Office where the monitoring and evaluation system of the Regional Revenue and Expenditure (APBD) at the Soppeng Education Office has been computerized in its management system, but has not been inputted in one the database so the management system takes a long time, and the data can be lost. The next objective is to design and implement a monitoring and evaluation information system for the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Soppeng Education Office. This research was conducted at the Soppeng District Education Office, with a period of about two months with data collection techniques using the method of observation, interviews and library techniques using visual basic 6.0 programming, with the Blackbox testing method. The results showed the existence of a system of monitoring and evaluation of the Regional Budget Revenue and Expenditure (APBD) at the Soppeng Education Office can provide information that is in accordance with what is desired and can help the Government in monitoring and evaluating the current and realized budgets.

Keywords: Information Systems, Monitoring, Evaluation, Revenue Budget Implementation.



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka babak baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia usaha, bisnis, instansi pemerintahan, dan berbagai institusi lain. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang kian meluas, telah memberikan banyak manfaat yang juga telah berimplikasi luas, terkait kinerja, *performance* usaha, kualitas layanan yang makin membaik dan dirasakan masyarakat.

Pada dasarnya, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk membuat atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk menghasilkan sebuah informasi yang relevan, strategis, akurat dan tepat waktu, untuk berbagai kepentingan seperti keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Dalam pemerintahan, perkembangan teknologi informasi sangat bermanfaat, khususnya pengelolaan dunia pendidikan.

Perkembangan zaman semakin pesat dan menjadikan harapan akan adanya pendidikan dapat membawa ke arah menuju kemajuan bangsa. Hal tersebut didasari oleh adanya pemikiran, bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci terpenting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya dengan memperhatikan biaya pendidikan yang menjadi pokok utama dalam pencapaian penyelenggaraan proses pendidikan.

Adapun tujuan dalam hal ini, yaitu agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai dengan adanya dukungan dan juga peran serta pemerintah atas ketersediaan dana pendidikan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan sudah dianggarkan dari penerimaan dan belanja daerah, dengan maksud setiap anggaran sudah ada pada tujuan masing – masing guna menunjang penyelenggaraan proses pendidikan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumber daya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Mardiasmo (2005:61), "anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah". Sedangkan menurut Nordiawan (2007:39), "APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan oleh peraturan daerah". Dalam hal tersebut, APBD merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sekaligus untuk menangani permasalahan pada bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana atau penyusunan keuangan tahunan, berdasarkan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 – 18, menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas anggaran, rencana kerja pemerintah daerah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam ketetapan Undang – Undang Pemerintah Daerah tersebut, pemerintah daerah mengelola anggaran yang berkaitan dengan bidang pendidikan atau kebutuhan setiap perencanaan dalam pencapaian anggaran yang berkaitan dengan pembiayaan. Pemerintah pusat telah melaksanakan amanat Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang No 20 Tahun 2003 yang mewajibkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa



untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng bertugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Soppeng bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas – tugas lain berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sistem Monitoring dan Evaluasi APBD pada dinas pendidikan kabupaten soppeng mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sebagaimana di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Pemerintah Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disepakati secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan Undang - Undang dan produk hukum yang diberlakukan, pemerintah telah berusaha mengakomodasi dan menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Sistem Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang erat kaitannya dengan anggaran itu sendiri baik itu dari APBD maupun APBN, karena apabila proses penyusunan anggaran sesuai dengan prinsip penyusunannya dan prestasi kerja pada instansi pemerintah maka Sistem Monitoring dan Evaluasi yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien. Namun Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Soppeng sudah terkomputerisasi dalam sistem pengelolaannya, tetapi belum terinput dalam satu database. Sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng disajikan dalam bentuk laporan secara periodik yang terdiri dari laporan pelaksanaan program/kegiatan yang sangat detail di mulai dari rencana operasional pelaksanaan kegiatan beserta dukungan anggaran yang dibutuhkan setiap tahapan pekerjaan, progress pelaksanaan setiap program/kegiatan per bulan, sampai dengan kinerja hasil dari program/kegiatan yang ingin dicapai beserta dengan evaluasinya yang terbagi dalam beberapa folder di komputer. Hal ini membuat sistem pengelolaan membutuhkan waktu yang lama, dan datanya bisa saja hilang. Sehingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng tidak efektif dan efisien.

Untuk mengatasi masalah yang ada, maka perlu di rancang sistem informasi yang bisa memonitoring dan mengevaluasi semua anggaran yang ada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- Bagaimana menganalisa sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng?
- Bagaimana merancang sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng?
- Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

- Untuk menganalisa sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
- Untuk merancang sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
- Untuk mengimplementasikan sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.



1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu :

- a) sebagai alternatif pertimbangan untuk menggunakan sistem yang telah dibuat tersebut sebagai pengganti sistem yang sedang berjalan.
- b) melatih diri dalam menganalisis permasalahan yang timbul, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi. Manfaat lain, yaitu menambah pengetahuan mengenai topik yang ditulis.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu system yang baik yang isinya adalah langkah - langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur - prosedur untuk mendukung operasi sistem.

Kata perancangan berasal dari kata rancangan sesuai yang ada pada sumber Poerwadarminta WJS (2002), yaitu rancangan program dan persiapan. Dengan memahami sistem yang ada dan persyaratan – persyaratan sistem baru, maka dengan mudah dapat membahas rancangan sistem yang baru. Adapun pengertian perancangan sistem menurut para pendapat ahli yaitu Menurut McLeod (2007:238) Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru, jika sistem itu berbasis komputer, perancangan dapat dinyatakan spesifikasi peralatan yang digunakan.

Menurut Kristanto (2013:61) Perancangan sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk elemen – elemen komputer yang akan menggunakan sistem, yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru. Dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi yang diperlukan oleh sistem yang ada serta untuk menunjang pengembangan sistem yang baru.

2.2. Kamus Data

Kamus Data (*Data Dictionary*) atau yang disebut juga dengan istilah *system data dictionary* adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan – kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus data di buat pada tahap analisis desain dan digunakan baik pada tahap analisis maupun pada tahap perancangan sistem. Sukanto, Ariani Rosa, dan M. Shalahuddin (2016:73) mengemukakan bahwa, kamus data (*data dictionary*) dipergunakan untuk memperjelas aliran data yang digambarkan pada DFD. Kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga masukan (*input*) data keluaran (*output*) dapat dipahami secara umum.

2.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring (bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Monitoring adalah rangkaian kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dengan durasi kegiatan rutin lebih pendek atau cepat daripada evaluasi, misalnya : mingguan, bulanan atau triwulanan. (Peraturan Pemerintah 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan).

Adapun pengertian monitoring menurut para pendapat ahli yaitu Menurut Mudjahudin dan Putra (2010:75) Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen proyek. Menurut Sutabri (dalam Herlina dan Rasyid ,2016:43) Monitoring juga didefinisikan sebagai



langkah untuk mengkaji apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar dapat langsung diatasi, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh kemajuan.

Jadi, Monitoring adalah kegiatan penilaian pola kerja yang dilakukan dengan cara mengkaji maupun mengamati sesuatu kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Manfaat monitoring sanitasi adalah sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan:

- a) Kemajuan relatif pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan – kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang telah disepakati.
- b) Usaha meningkatkan kinerja dan akuntabilitas SKPD dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi

Tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/program. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan pada waktu yang cukup. *Evaluasi* tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil – hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah.

Adapun pengertian evaluasi menurut para pendapat ahli yaitu Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008) *Evaluasi adalah "the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives," Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.* Menurut Yunanda (2009) *Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.* Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yakni bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. *Monitoring atau* pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus – menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu.

Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil monitoring adalah simpulan – simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah simpulan – simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui perbandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya.

2.4. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Halim (2012:10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Badrudin (2012:97) APBD adalah suatu



rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah disetujui Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan APBD adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dari pendataan daerah yang telah direncanakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan tiga metode yaitu :

1. Teknik Observasi

Sistem : Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	
Waktu Wawancara : Minggu kedua	Tempat : Dinas Pendidikan Soppeng
Tujuan dari observasi ini adalah memperoleh data yang berhubungan dengan obyek penelitian yang berguna dalam merancang sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Observasi ini berguna untuk melihat secara langsung bagaimana pengolahan data monitoring dan evaluasi dilakukan saat ini, dan mengamati dimana letak permasalahan yang terjadi pada sistem yang berjalan. Pada Kantor Dinas Pendidikan Soppeng Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pengelolaannya membutuhkan waktu yang lama, dan data bisa saja hilang, karena data yang ada terbagi dalam beberapa folder di komputer.	

2. Teknik Wawancara

Sistem : Perancangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng		Narasumber : Pegawai
	Minggu : Kedua	Tempat : Ruang pegawai



Topik wawancara :

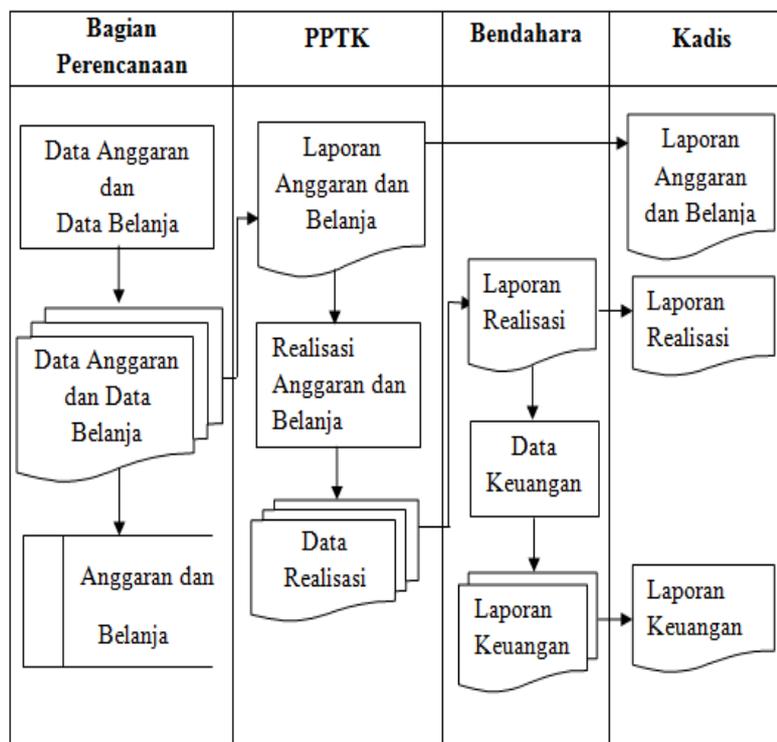
- a) Proses apa saja yang dilakukan pada saat pengolahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b) Data apa saja yang dibutuhkan dalam pengolahan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c) Output (hasil pengolahan data) yang selama ini dihasilkan.
- d) Siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengolahan data dan yang membutuhkan informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e) Kendala apa saja yang didapatkan pada sistem yang berjalan saat ini.

2. Studi Pustaka

Mempelajari buku referensi yang relevan untuk mendapatkan pengetahuan dan landasan teori serta konsep – konsep lainnya.

3.2. Analisis Sistem Lama

Sistem yang sedang berjalan pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng disajikan dalam bentuk laporan secara periodik yang terdiri dari laporan pelaksanaan program/kegiatan yang sangat detail dimulai dari rencana operasional pelaksanaan kegiatan beserta dukungan anggaran yang dibutuhkan setiap tahapan pekerjaan, progress pelaksanaan setiap program/kegiatan per bulan, sampai dengan kinerja hasil dari program/kegiatan yang ingin dicapai beserta dengan evaluasinya yang terbagi dalam beberapa folder di komputer. Hal ini membuat sistem pengelolaan membutuhkan waktu yang lama, dan datanya bisa saja hilang. Sehingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng tidak efektif dan efisien:

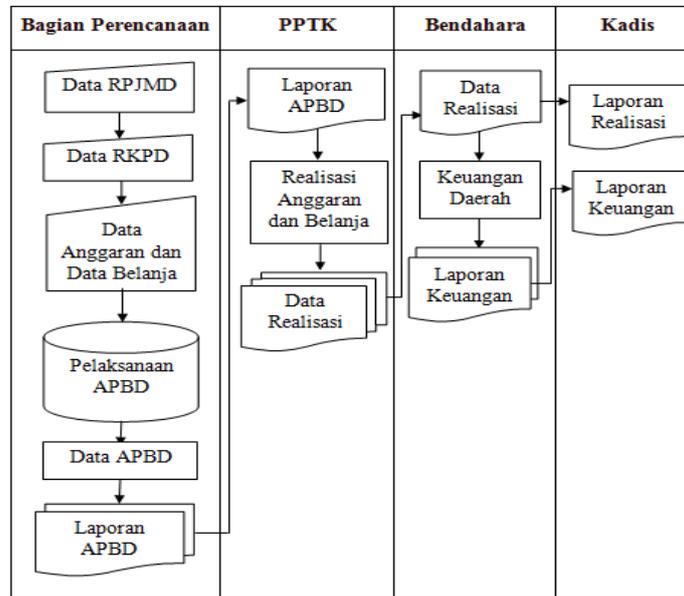


Gambar 1. Dokumen Flowchart Sistem Lama



3.3. Rancangan Sistem Yang Diusulkan

Sistem informasi yang bisa memonitoring dan mengevaluasi semua anggaran yang ada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng:



Gambar 2. Dokumen Flowcahrt Sistem diusulkan.

Analisa adalah suatu kegiatan dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi. Analisa bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem yang akan dikembangkan berdasarkan masukan dari calon pemakai (*user*). Proses pengolahan pelaksanaan APBD telah menggunakan sistem LOGOS (*Logistik Government System*) untuk membuat laporan dan pengolahan data. Hal ini menyebabkan pembuatan laporan dan pengolahan data kurang efektif dan efisien dalam memberikan informasi bagi pengguna serta sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD disajikan dalam bentuk laporan secara periodik yang terbagi dalam beberapa folder, sehingga datanya bisa saja hilang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Sistem

1. Form Menu Utama



Gambar 3. Halaman Utama



2. Form Data SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Tolikua, Sulawesi Tengah

DASHBOARD SKPD LAPORAN SINKRONISASI PENGGUNA SISTEM
Ikhwan Thahirin | ADMIN

Data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) + TAMBAH

Filter

DARI	BULAN	Pilih Bulan	SAMPAI	BULAN	Pilih B
	TAHUN	Pilih Tahun		TAHUN	Pilih T
PERANGKAT DAERAH	- Pilih -				FILTER

Gambar 4. Form Data SKPD

3. Form Laporan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Tolikua, Sulawesi Tengah

DASHBOARD SKPD LAPORAN SINKRONISASI PENGGUNA SISTEM
Ikhwan Thahirin | ADMIN

DAFTAR LAPORAN SKPD EKONOMI Cetak

Search

NO.	PERANGKAT DAERAH	PD YANG MEMASUKKAN LAPORAN REALISASI PERK DAN KEUANGAN 2018	PD YANG MEMASUKKAN LAPORAN EVALUASI RENJA 2019	REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TW II	KETERANGAN
1	Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura	BELUM ADA	BELUM ADA	-	Seluruh Lengkap / Tidak Sesuai
2	Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Satu Pintu	BELUM ADA	BELUM ADA	-	Seluruh Lengkap / Tidak Sesuai
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	BELUM ADA	BELUM ADA	-	Seluruh Lengkap / Tidak Sesuai

Gambar 5 Form Data Ruangan

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai Perancangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng dengan menggunakan pemrograman visual basic 6.0 yang dapat membantu meningkatkan kinerja Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Soppeng dalam pelaporan yang dapat dilakukan secara cepat dan mengurangi biaya operasional.
2. Dengan diimplementasikannya Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Soppeng Soppeng dapat memberikan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan dan dapat membantu Pemerintah dalam memonitoring dan mengevaluasi anggaran yang sedang berjalan maupun yang telah terealisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kristanto, 2013. *Perancangan Sistem informasi dan aplikasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumo Ario Suryo, Drs., 2000. *Buku Latihan Microsoft Visual Basic 6.0*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.
- McLeod. 2007. *Management Information System*. New Jersey: Pearson Education.
- Pahlevy. 2010. *Dasar – Dasar Visual Basic 6.0*. Bandung : Graha Ilmu
- Romney, Marshall .B, dan Paul John Steinbar, 2015. “*Accounting Information System, 13 ed*”. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Stufflebeam, D.L. 2008. *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco : A Wiley Imprint.
- Suryo, Aryo Kusuma. 2004. *Kelebihan Visual Basic 6.0*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi
- Wahyono Teguh. 2004. *Sistem Informasi, Konsep Dasar, Analisa Desain dan Implementasi* , Yogyakarta : GRAHA Ilmu.
- WJS, Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Balai Pustaka.
- Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Balai Pustaka.